Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Implementasi Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Di Desa Bangka Pau Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur)

Yenita Alfa Denaor[1], Dominikus Fernandez[2], Cataryn V. Adam[3]

[123] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni, 2025
Revised Juni, 2025
Accepted Juni, 2025
Available online Juni , 2025

yenitadenaor16@gmail.com
fdominikus19@gmail.com
adamcatrynn@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangka Pau Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur. Program ini merupakan salah satu program pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses rumah layak huni. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* dengan jumlah 8 orang. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori implementasi dari George Edward III dengan empat aspek yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Bangka Pau sudah berjalan cukup baik tetapi masih belum optimal karena masih terdapat aspek yang kurang diperhatikan seperti sosialisasi dilakukan kurang optimal dan juga masih terdapat hambatan seperti jumlah sumberdaya yang masih terbatas, jumlah pembangunan rumah yang masih sedikit dibandingkan kebutuhan, anggaran program yang masih minim, waktu pengerjaan yan masih terhambat karena beberapa masalah serta partisipasi masyarakat juga masih kurang tetapi implementor dalam program sudah sangat konsisten dan bertanggung jawab sehingga program tetap berhasil dijalankan

Kata Kunci : Implementasi; program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)

A B S T R A C T

Implementation is an application, idea, concept, policy or innovation in a practical action, so that it has a good impact in the form of changes in knowledge, skills, values and attitudes. This study aims to determine the implementation of the self-help housing stimulus assistance program policy in Bangka Pau Village, Lamba Leda Selatan District, East Manggarai Regency. This program is one of the government programs through the Minister of Public Works and Public Housing to improve the community's ability to access decent housing. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The informants in this study were determined purposively with a total of 8 people. The theory used to support this study is the

*Corresponding author
E-mail addresses: yenitadenaor16@gmail.com

implementation theory of George Edward III with four aspects, namely, communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance program in Bangka Pau Village has been running quite well but is still not optimal because there are still aspects that are not given enough attention, such as socialization being carried out less than optimally and there are still obstacles such as the number of resources that are still limited, the number of house constructions that are still small compared to need, the program budget is still minimal, the work time is still hampered by several problems and community participation is also still lacking, but the implementers in the program have been very consistent and responsible so that the program is still running succesfully

***Keywords**: Implementation; self-help housing stimulus assistance (BSPS) program.*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya membangun rumah adalah tanggung jawab setiap warga negara, negara hanya membantu agar akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dapat dilakukan secara adil dan merata namun, faktanya terdapat sebagian masyarakat yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik hunian dalam lingkungan sosial ekonominya, merujuk pada hal inilah pemerintah berupaya untuk menghadirkan program yang bertujuan membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menjadikan rumah sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan. Tujuan ini dicapai dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, program ini merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan prakarsa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kurang mampu dalam membangun atau meningkatkan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan salah satunya adalah program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di atur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah penyelenggaraan yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya serta intensif pembangunan baru rumah swadaya. Berpedoman pada materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pada dasarnya keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik tetapi juga meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan (Maswandhani Destriando and Victor Lumbanraja 2024).

Tujuan utama program pembangunan rumah layak huni adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar lebih sejahtera untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak untuk di huni.

Salah satu desa yang melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah Desa Bangka Pau. Desa Bangka Pau merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 1.239 jiwa yang terdiri dari 274 KK. Desa Bangka Pau telah melaksanakan program bantuan rumah layak huni sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 dengan rincian pada tahun 2017 jumlah rumah yang diusulkan sebanyak 7 unit, tahun 2018 sebanyak 5 unit, selanjutnya 2019 sebanyak 3 unit dan pada tahun 2022 sebanyak 3 unit. Dari data nama-nama calon peserta penerima bantuan program yang diusulkan, hanya beberapa yang dapat direlisasikan dalam artian,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

tidak semua usulan dapat dilakukan pembangunan misalnya pada tahun 2018 terdapat 5 rumah yang diusulkan namun hanya 3 yang terealisasi kemudian tahun 2019 terdapat 3 unit rumah yang diusulkan namun hanya 1 unit rumah saja yang dianggarkan, program ini juga tidak aktif dilaksanakan setiap tahunnya (dalam kurun waktu 6 tahun belakangan) selain itu pada tahun 2020-2021 tidak ada rumah yang diusulkan dan baru kembali diusulkan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3 unit tetapi hanya 2 unit rumah yang dianggarkan, selanjutnya tahun 2023-2024 juga tidak terdapat rumah yang dianggarkan untuk dilakukan pembangunan.

Kendala lain dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Bangka Pau yang ditemui juga berupa keterbatasan dan keterlambatan pencairan dana, kondisi ini berimplikasi pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya terutama material bahan bangunan, dana yang tersedia di nilai tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan rumah, mengingat tingginya harga material konstruksi dan biaya tenaga kerja. Para penerima bantuan mengalami kesulitan dalam penambahan dana pembangunan akibatnya, penerima bantuan terpaksa mencari sumber pendanaan tambahan dengan cara meminjam dari individu atau lembaga keuangan seperti koperasi. Keterlambatan pencairan dana secara langsung juga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan dan berpotensi memperpanjang durasi proyek di luar tenggat waktu yang telah ditetapkan, ini mengakibatkan para pekerja konstruksi mengalami masa menganggur yang cukup lama akibat ketersediaan bahan bangunan yang terbatas. Tekanan untuk mengejar target penyelesaian dalam waktu singkat seringkali memaksa para pekerja untuk mengambil jalan pintas, sehingga kualitas hasil pembangunan menjadi tidak optimal. Akibatnya, para penerima manfaat program harus menunggu lebih lama untuk dapat menempati rumah layak huni yang telah menjadi hak masyarakat.

Selain permasalahan-permasalahan di atas, kendala lain yang ditemui yakni program bantuan stimulan perumahan swadaya menerapkan salah satu sistem mekanisme yakni melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya kerabat dan tetangga penerima manfaat dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah. Hal ini dilakukan dengan cara mengalokasikan dana bantuan hanya untuk pembelian bahan bangunan sementara tenaga kerja diharapkan berasal dari gotong royong masyarakat sekitar namun, pendekatan ini menimbulkan kendala tersendiri. Ketiadaan ketentuan yang bersifat mengikat bagi para kerabat dan tetangga untuk memberikan bantuan secara aktif mengakibatkan ketidakpastian dalam ketersediaan tenaga kerja dan berpotensi memperpanjang durasi pelaksanaan proyek.

Hal lain yang juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan rumah yakni komunikasi yang kurang efektif dan penentuan target yang di nilai msih kurang menjadi salah satu kendala lainnya. Pada dasarnya sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni dan pada umumnya masyarakat di Desa Bangka Pau termasuk dalam kriteria kepala keluarga berpenghasilan rendah serta masih banyak yang tidak memiliki rumah layak huni namun, masyarakat miskin yang ada di Desa Bangka Pau belum seluruhnya mendapatkan bantuan rumah sederhana layak huni. Permasalahan lain yang ditemui oleh penulis juga seperti kurangnya pemahaman para penerima manfaat program akan mekanisme dan tujuan program yang sesungguhnya mengakibatkan program ini kurang relevan dengan tujuannya. Akibat dari hal ini muncul berbagai penyimpangan seperti kualitas bangunan yang tidak sesuai standar serta pembangunan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya disfungsi sistem yang mendasar dalam pelaksanaan program bantuan tersebut hal ini menjadi beberapa faktor yang di duga menyebabkan program ini tidak berjalan efektif, akibatnya tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penyediaan rumah layak huni di duga belum tercapai secara optimal.

*Corresponding author
E-mail addresses: yenitadenaor16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukan bahwa dalam pengimplementasian program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangka Pau Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur memiliki sejumlah kendala yang dialami yang menghambat pencapaian tujuan program, mulai dari kurangnya sosialisasi sebagai sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi, sumber daya dalam hal ini pendanaan yang kurang dan cenderung terlambat, sasaran kebijakan yang masih kurang tepat serta keberlangsungan program yang tidak sesuai SOP yang berlaku sehingga program tersebut dinilai belum berjalan secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang memiliki hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Dalam pilihan tersebut juga mencakupi keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, hal itu tergantung manfaat dan kerugiannya (Sitorus, Program, and Komunikasi 2020).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Frankli (dalam Winarno 2007;145) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output). Grindle (dalam Winarno Budi 2007)) juga menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan agar bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Hal ni berarti kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya (Eko Handoyo 2012) .

Model Kebijakan Publik George Edward III

Model George Edward III (1984:10) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
   Komunikasi kebijakan menjadi hal yang penting karena informasi kebijakan publik perlu disampaiakan kepada pelaku kebijakan agar para implementor dapat mengetahui apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran dari suatu kebijakan sehingga para implementor dapat mempersiapkan dengan baik segala sesuatu yang perlu dipersiapkan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.
   Komunikasi yang dilakukan juga harus mencakupi setidaknya tiga dimensi yaitu; dimensi transmisi (transmition), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).
2. Sumber Daya
   Faktor sumber daya memiliki peranan yang penting karena walaupun penyampaian ketentuan dan aturan suatu kebijakan telah disampaikan secara jelas, konsisten dan akurat tetapi apabila para implemntornya tidak memiliki sumber daya yang baik untuk melaksanakan suatu kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya dapat

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

meliputi; sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya peralatan serta sumber daya informasi seta kewenangan.

3. Disposisi
   Keberhasilan implementasi bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi diartikan sebagai kecendrungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif maka para pelaksana harus mempunyai kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut karena intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan karena kurang atau terbatasnya intensitas disposisi dapat mengakibatkan gagalnya implementasi suatu kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
   Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dan hubungan antar organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksanan kebijakan dalam melaksankan apa yang menjadi bidang dan tugasnya masing-masing

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan. Salah satunya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Progam bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di atur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah penyelenggaraan yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya serta intensif pembangunan baru rumah swadaya. Berpedoman pada materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Pada dasarnya keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik tetapi juga meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan (Maswandhani Destriando and Victor Lumbanraja 2024)

Menurut (Robiansyah, Suryapermana, and Sudrajat 2022) Kebijakan pemerintah tentang program BSPS berlaku secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program BSPS, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Standar ini terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018, peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran BSPS. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan perumahan swadaya bersubsidi teratur, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan mudah dipahami

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program pemerintah yang dapat diartikan sebagai proses keberfungsian sosial melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar terciptanya kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal

*Corresponding author
E-mail addresses: yenitadenaor16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tujuan dan sasaran rogram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Program Bantuan stimulan peumahan swadaya diadakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah guna memiliki rumah yang layak untuk di huni, adapun tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin tempat tinggal yang lebih layak.

Beberapa sasaran penerima banuan BSPS; (a) berdomisili di wilayah tersebut, dibuktikan dengan menunjukan KTP (b) penghasilan di bawah upah minimum kabupaten, (c) telah berkeluarga, (d) di bangun di atas tanah pribadi, (d) tidak pernah menerima bantuan rumah dari pemerintah dan (e) didahulukan kepada :keluarga dengan kepala keluarga yang telah lanjut usia dan telah memiliki rencana membangun atau peningkatan kualitas rumah yang dibuktikan dengan telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan.

Kriteria KK Yang Layak Menerima Bantuan Rumah Layak Huni

Adapun kriteria dalam pogram ini adalah: 1). Atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah 2). Dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk. 3). Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau terdapat surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/desa atas status tanah. 4). Tidak memiliki ventilasi udara yang memadai. 5). Lantai terbuat dari tanah.

Penerima bantuan program ini ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang berfokus pada kondisi hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Secara umum, program ini menyasar rumah-rumah yang memiliki kerusakan signifikan pada struktur utama, seperti atap dan dinding yang tidak layak atau berkualitas rendah, termasuk material yang sudah lapuk. Selain itu, kondisi internal rumah juga menjadi perhatian, khususnya bagi rumah yang tidak memiliki sirkulasi udara yang memadai dan masih menggunakan lantai dari tanah. Penting juga bahwa calon penerima harus membuktikan kepemilikan sah atas tanah tempat rumah berdiri, baik melalui sertifikat maupun surat keterangan resmi dari pemerintah desa/kelurahan. Kriteria ini memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan perbaikan kualitas hidup melalui peningkatan kondisi hunian

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 8 orang. Penelitian ini dilakukan di Desa Bangka Pau Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan dengan tahapan yakni; observasi dan wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (yang mengumpulkan data) kepada responden (yang memberikan jawaban) (Nurhoko,dkk 2007 dalam Anggraeni 2021) kemudian data penelitian dikumpulkan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya baru kemudian dilakukan uji keabsahan data. Penelitian ini berfokus pada bagian yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara primer yakni melalui wawancaa dan observasi serta data sekunder yakni melalui dokumen dan studi kepustakaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi, permasalahan yang sering di alami adalah adanya salah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.Agustino 2017 dalam (I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih 2022)

Dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Bangka Pau, penyaluran informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat penerima bantuan sebagai sasaran program dalam suatu pertemuan untuk diberikan informasi terkait syarat dan ketentuan program BSPS yang akan dilakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam pelaksanaan program rumah itu sendiri. Hal ini tampak sudah berjalan dan sudah terlaksana sebagaimana mestinya, karena apabila komunikasi tidak terlaksana akan menghasilkan kurang pemahaman atau berdampak tidak baik seperti membingungkan masyarakat. Kondisi tersebut juga dilakukan agar terciptanya hasil yang baik dalam pelaksanaan program dari pemerintah, sehingga pelaksanaan program bantuan ini dapat berjalan dengan lancar serta mencapai tujuan yang diinginkan, akan tetapi penulis melihat bahwa dalam pemberitahuan informasi mngenai program BSPS di Desa Bangka Pau tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh ke lapisan masyarakat tetapi hanya langsung ditujukan kepada masyarakat yang telah di tetapkan sebagai penerima bantuan saja sehingga masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui keberadaan program ini. Hal ini berdampak pada minimnya jumlah penerima bantuan karena sebagian masyarakat yang tidak memasukan berkas melainkan tunggu dihubungi oleh pihak desa saja untuk mengajukan serta memasukan berkas data nama sebagai calon penerima.

Kejelasan Informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bereuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Penulis menilai bahwa pemberian informasi mengenai program BSPS di desa Bangka Pau sudah berjalan dan sudah terlaksana, pemberian informasi dilakukan secara langsung dengan masyarakat akan tetapi, dalam penyampaian kejelasan informasi yang telah dilakukan ada beberapa tahapan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah desa hal ini mengakibatkan masyarakat mengalami sedikit kebingungan sehingga terkait hal ini, sebagian masyarakat menekankan agar penyampaian informasi khususnya terkait dana yang diberikan dapat diberitahukan dengan jelas dan transparan agar tidak menciptakan perselisihan antar masyarakat atau para pelaksana

Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan) karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Pemerintah desa sudah konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penanggung jawab program bantuan rumah di Desa Bangka Pau. Komunikasi atau informasi yang berupa perintah sudah berjalan dan sudah terlaksana. Pelaksanaannya pun sesuai dengan yang diperintahkan dan tidak membingungkan masyarakat. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan program bantuan ini sudah benar dan jelas serta sudah konsisten sesuai yang diterapkan.

Dalam implementasi Program BSPS di Dsa Bangka Pau, kualitas komunikasi diukur melalui tiga dimensi yakni transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi. Transmisi yang efektif

*Corresponding author
E-mail addresses: yenitadenaor16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

memastikan informasi mengenai program BSPS, seperti mekanisme pelaksanaan dan kriteria penerima, menjangkau seluruh pihak yang terlibat secara tepat waktu dan akurat. Kejelasan informasi memastikan bahwa pesan-pesan terkait program, termasuk pedoman teknis dan prosedur, mudah dipahami oleh semua aktor implementasi, sehingga mengurangi potensi misinterpretasi. Terakhir, konsistensi pesan yang disampaikan dari berbagai tingkatan pemerintahan dan sumber informasi menciptakan pemahaman yang seragam dan menghindari kebingungan di lapangan. Dengan demikian, efektivitas komunikasi, yang dibangun oleh transmisi yang baik, kejelasan pesan, dan konsistensi informasi, merupakan prasyarat penting dalam mencapai implementasi Program BSPS yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, Ketiga aspek ini secara interdependen berkontribusi pada kualitas komunikasi secara keseluruhan, yang menurut teori Edward III, merupakan salah satu prasyarat tercapainya implementasi kebijakan yang sukses.

Sumberdaya

Menurut Edward III (AG. Subarsono 2010:90 dalam Mirza 2018) Resourcess (sumber daya) dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber daya pendukugnya tidak tersedia.Sumberdaya menjadi salah satu faktor lain yang menentukan keberhasilan suatu program. Suatu program yang dirancang dengan baik serta dikomunikasikan secara efektif tetap akan mengalami kegagalan dalam proses implementasi apabila terdapat kekurangan sumber daya pada personel pelaksananya. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi staf, keahlian, informasi, anggaran, wewenang, dan fasilitas.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya hal ini dapat di lihat dari kompetensi personel dan tanggung jawab dalam penerapan kebijakan terlepas dari kejelasan dan konsistensi regulasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, walaupun sebuah kebijakan sudah sangat baik dan jelas tetapi jika SDM yang menjalankannya kurang memadai, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif sehingga keberhasilan suatu program sangat bergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Bangka Pau, ketersediaan sumber daya manusia jika di tinjau dari segi kuantitas dalam pelaksanaan program ini masih kurang memadai hal ini tandai dengan kurangnya personel satuan kerja yang dibentuk oleh pemerintah desa sehingga secara kualitas pun juga masih dapat dikatakan berkurang. Kondisi ini berpengaruh pada proses pembangunan yang mengakibatkan tidak meratanya pengawasan yang dilakukan dan kurang cukup untuk menjangkau seluruh tugas dan pelayanan kepada kelompok masyarakat akan tetapi, kesadaran yang dimiliki oleh masing masing implementor sangat tinggi sehingga meskipun mengalami kendala, tetap berusaha untuk menyelesaikan program tersebut.

Analisis menunjukkan bahwa kuantitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi suatu program. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya, melainkan juga oleh ketersediaan jumlah personel yang memadai untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsi program secara efektif. Kuantitas sumber daya yang memadai memungkinkan pembagian kerja yang optimal, respons yang lebih cepat terhadap tantangan, dan cakupan implementasi yang lebih luas. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi program merupakan fungsi dari interaksi yang kompleks antara aspek kuantitatif dan kualitatif sumber daya manusia dalam situasi di mana kuantitas sumber daya terbatas, kualitas individu yang tinggi, tercermin dari pemahaman yang mendalam dan keahlian

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

yang relevan, dapat mengkompensasi kekurangan dalam jumlah. Dengan demikian, efektivitas implementasi program merupakan hasil interaksi antara dimensi kuantitatif dan kualitatif dari sumber daya manusia.

Sumber Daya finansial

Selain sumber daya manusia sejatinya sumber daya finansial juga sangat dibutuhkan hal ini disebabkan keuangan berperan sebagai stimulus yang dapat melancarkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan progam, terkait sumber daya dana diketahui bahwa dana dalam progam ini bersumber dari APBD Kabupaten Matim dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) Bangka Pau. Alokasi dana dalam pelaksanaan progam ini sebesar RP.10.000.000 per rumah dan diberikan dalam bentuk bahan material seperti seng, paku, pasir, semen dan batu bata kepada para penerima bantuan. Dana yang ada tidak sepenuhnya diberikan melainkan tedapat pemotongan pajak. Masyarakat penerima bantuan juga merasa kurang puas dengan alokasi dana yang dianggarkan karena menurut meeka dana tersebut kurang cukup untuk membangun sebuah rumah dan bahan material yang dibeli pun belum cukup untuk memenuhi proses pembangunan sehingga para penerima bantuan harus mencari dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan tambahan. Selain itu proses penerimaan bantuan bahan material oleh warga mengalami beberapa hambatan. Pertama, terjadi keterlambatan dalam pasokan pasir karena desa hanya bergantung pada satu distributor sementara pembangunan dilakukan secara bersamaan akibatnya tejadi kekurangan stok, sehingga pendistribusian pasir harus dilakukan secara bertahap. Kedua, terdapat masalah terkait kerusakan material berupa batu bata pada saat proses pemuatan di dumptruck dalam hal ini masyarakat dibebankan tanggung jawab atas kerusakan tersebut meskipun para penerima bantuan tidak menyebabkannya, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penggantian bahan material yang rusak tersebut.

Sumber daya finansial dalam hal ini dana sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program Anggaran yang memadai adalah aspek kunci dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya finansial untuk mencapai tujuan organisasi atau individu. Anggaran yang memadai membantu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, serta memastikan bahwa tujuan finansial dapat tercapai dengan efektif

Sumber daya waktu

Menurut Muzayanah dalam (Hawari, Oktaviani, and Nurisra 2021) menjelaskan waktu ialah sumberdaya pokok pada pelaksanaan sebuah program. Pengendalian dan perencanaan waktu dilakukan dengan mengatur scheadule, dengan cara mengidentifikasi titik kapan pekerjaan dimulai dan kapan berhenti. Perencanaan dan pengendalian ialah bagian dari penyusunan biaya. Pada hubungan ini, sering kali pengelola program beranggapan bahwa penyelesaian program semakin cepat semakin baik.

Terkait sumber daya material dalam pelaksanaan prrogram bsps di desa bangka pau mengalami beberapa hambatan pertama, terjadi keterlambatan dalam pasokan pasir karena desa hanya bergantung pada satu distributor sementara pembangunan dilakukan secara bersamaan akibatnya tejadi kekurangan stok, sehingga pendistribusian pasir harus dilakukan secara bertahap, kedua permasalahan keterbatasan dana tambahan yang dialami oleh para penerima bantuan sehingga menyebabkan jangka waktu pembangunan menjadi lebih lama dari yang seharusnya

Hasil analisis menunjukan bahwa penetapan alokasi waktu pengerjaan dalam tahapan perencanaan program pembangunan seringkali mengalami disparitas dengan realitas implementasi di lapangan. Identifikasi terhadap berbagai kendala dan hambatan yang muncul

*Corresponding author
E-mail addresses: yenitadenaor16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

selama proses konstruksi menjadi hal yang penting dalam memahami faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek. Fenomena ini menegaskan signifikansi peran implementor sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab dalam mendiagnosis permasalahan, merumuskan tindakan korektif, serta mengimplementasikan solusi secara efektif. Kapabilitas implementor dalam mengatasi berbagai kendala secara adaptif dan efisien akan berdampak langsung terhadap optimalisasi jadwal dan pencapaian target waktu penyelesaian proyek pembangunan.

Sumber daya Material

Vlack dalam (Hawari 2021) menjelaskan material yang dispesifikasi harus memiliki sifat yang sesuai pertama-pertama untuk produksi, dan selanjutnya untuk tujuan pemakaiannya. Produk tidak boleh gagal selama pemakaian, yang merupakan tanggung jawab produsen. Material merupakan suatu bahan yang diproduksi oleh pabrik atau produksi yang dilakukan sendiri. Dalam suatu proyek konstruksi material merupakan bagian komponen yang sangat penting

Penyaluran bantuan dalam bentuk material secara eksklusif merupakan sebuah pendekatan dalam alokasi sumber daya yang spesifik. Pendekatan ini diasumsikan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan memastikan bahwa material langsung digunakan untuk pembangunan rumah, serta mengurangi potensi penyimpangan atau penggunaan dana untuk keperluan di luar tujuan program. Ini adalah strategi pengelolaan sumber daya untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan *output* yang diinginkan, yaitu rumah layak huni. Namun, di sinilah letak tantangan dalam manajemen sumber daya yang lebih luas. Insiden kerusakan material selama proses pengiriman, yang kemudian dibebankan kepada penerima bantuan, menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai pasok sumber daya. Material yang rusak ini secara efektif menjadi pemborosan sumber daya karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal, dan bahkan memerlukan tambahan alokasi sumber daya (baik itu waktu, tenaga, atau biaya tambahan dari penerima) untuk memperbaikinya. Hal ini menyoroti bahwa alokasi sumber daya yang tepat di awal (pemberian material) tidak menjamin efektivitas pemanfaatan sumber daya jika manajemen logistik dan distribusi tidak optimal.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan program dan implementasi di lapangan, terutama dalam aspek manajemen risiko dan penanganan logistik. Beban finansial yang ditimbulkan oleh kerusakan material yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak lain dapat mengurangi efektivitas bantuan dan bahkan menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan ekonomi keluarga penerima yang sudah dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali prosedur pengiriman dan serah terima material, serta mendefinisikan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan material yang terjadi sebelum material tersebut sepenuhnya berada di tangan penerima, guna memastikan bahwa bantuan program BSPS benar-benar optimal dan bebas dari beban tambahan yang tidak semestinya.

Disposisi

Edward III memandang disposisi dari implementor sebagai suatu faktor yang penting. Dalam hal ini, Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial, karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan dilapangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat kurang mampu adalah sikap implementor sebagai pelaksana dari suatu kebijakan atau program, jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka tentu akan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dilaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan ternyata berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah atau kendala dilapangan. Ada 3 (tiga) bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut

Kesadaran pelaksana

Dalam teori disposisi Edward III, kesadaran pelaksana kebijakan adalah kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan tanpa bias. Disposisi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, Dalam pelaksanaan program BSPS di desa bangka pau, implementor kebijakan dalam hal ini pemerintah desa Bangka Pau terlihat telah melaksanakan pogram dengan kesadaran penuh.

Implementor kebijakan di pemerintahan desa Bangka Pau tidak hanya memahami tugas-tugas teknis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam dan empati terhadap kebutuhan masyarakat. Kesadaran ini melampaui sekadar kepatuhan prosedural tetapi juga mencerminkan adanya motivasi intrinsik untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga. Disposisi yang positif ini, yang ditandai dengan kesadaran tinggi dan rasa tanggung jawab, merupakan fondasi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif dan tanpa bias, sebagaimana digariskan oleh teori Edward III. Artinya, para pelaksana tidak sekadar menjalankan perintah, tetapi benar-benar terinternalisasi dengan tujuan program dan berupaya keras untuk mewujudkannya demi kesejahteraan masyarakat desa mereka.

Petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan,

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di desa bangka pau sendiri pemerintah desa sepenuhnya menerima kebijakan program ini dan menjalankannya karena memahami tujuan program baik adanya untuk kehidupan masyarakat desa selain itu pemerrintah desa juga tampak telah bekomitmen penuh untuk melaksanakan program BSPS, hal ini dibuktikan dengan tanggapan masyarakat penerima bantuan yang merasa sikap para pelaksana sama sekali tidak menyulitkan selama proses pembangunan berlangsung.

Pernyataan-pernyataan dalam wawancara ini memberikan gambaran yang jelas mengenai respons positif dan penerimaan penuh dari para pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Bangka Pau. Berbeda dengan kekhawatiran umum bahwa implementor mungkin memahami tujuan program namun secara sembunyi-sembunyi menolak atau mengalihkan implementasinya, data ini menunjukkan hal sebaliknya. Kepala Desa Bangka Pau secara tegas menyatakan bahwa jika para pelaksana memahami dasar dan tujuan program, mereka tentu akan mengikuti petunjuk dan arahannya. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa tidak ada resistensi, ini menunjukkan bahwa petunjuk dan arahan program diterima dan diinternalisasi oleh pemerintah desa, yang kemudian menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata.

Penerimaan kebijakan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasari oleh pemahaman mendalam terhadap tujuan program yang dianggap baik untuk kehidupan masyarakat desa. Sikap kooperatif dan dukungan aktif dari para pelaksana mulai dari proses administrasi hingga tahapan pembangunan membuktikan bahwa tidak ada upaya untuk menyulitkan atau menghambat penerima bantuan. Ini mengindikasikan adanya keselarasan antara niat kebijakan dan perilaku

*Corresponding author
E-mail addresses: yenitadenaor16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

implementasi di lapangan, yang pada akhirnya berkontribusi besar pada kelancaran dan penerimaan program oleh masyarakat. Dengan demikian, respons pelaksana terhadap program ini dapat dikategorikan sebagai penerimaan total dan implementasi yang proaktif, didorong oleh pemahaman dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengn ini, sikap para pelaksana program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Bangka Pau sudah berjalan optimal dan sangat antusias dalam membantu masyarakat dalam perlengkapan berkas yang dibutuhkan, sehingga tidak adanya kebingungan yang dialami masyarakat saat dimintai berkas yang dibutuhkan, masyarakat hanya memberikan beberapa surat-surat, menandatangani beberapa berkas dan materai sebagai kelengkapan pemberkasan. Sehingga untuk sikap pelaksana para implementor sudah dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan optimal dalam pencapaian sasaran kebijakan. Jika di tinjau dari variabel disposisi dikatakan sudah lancar dan bagus, indikator-indikator pendukung dalam disposisi ini juga berjalan dan sudah terlaksana. Bentuk sikap pelaksana dalam pelaksanaan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, dimana para implementor bekerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah, yang terpenting dalam variabel ini ialah untuk menunjang tercapainya pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Struktur Birokasi

Meskipun sumber sumber untuk mengiplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui cara melakukannya serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, Namun menurut Edward III,1980:125), Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefesien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit orgaisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan serta hubungan antara organisasi dengan organisasi luar. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (standart operating posedural) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang mejadi bidang tugasnya. Hasil penelitian menunjukan pemerintah desa menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Bangka Pau. Hal ini mengakibatkan pemerintah desa juga mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengontrol keberlangsungan program.

SOP (Standart Operating Prosedure)

Standart Operating Prosedure (SOP) memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun di buat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia selain itu SOP juga dapat menyeragami tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan aturan- aturan. Terkait aspek ini diketahui bahwa, Pemerintah Desa memiliki SOP yang menjadi pedoman untuk menjalankan tugas dalam pelaksanaan program BSPS di desa Bangka Pau. Dari hasil penelitian, Pemerintah desa selaku implementor benar-benar mengacu dan sangat berpegang teguh pada SOP yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program agar pelaksanan pembangunan sesuai dengan standar dan prosedur yang ada.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa selaku implementor di tingkat desa menunjukkan komitmen tinggi terhadap formalitas dan struktur

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pelaksanaan program (kepatuhan SOP). Pemerintah desa memahami bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang akuntabel dan sesuai standar. Namun, kepatuhan ini tidak sepenuhnya dapat menghindari potensi hambatan eksternal seperti masalah rantai pasok material, yang meskipun dapat memperlambat proses, pada akhirnya tetap diselesaikan dalam kerangka SOP yang ada. Hal ini menggambarkan keseimbangan antara fleksibilitas operasional dalam menghadapi kendala dan rigiditas dalam mempertahankan integritas prosedural program.

Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak desa aktif berkoordinasi dengan pihak dinas maupun kecamatan guna menunjang program. Tugas dan fungsi desa, dusun serta RW/RT, dalam program BSPS ialah sebagai pendamping sekaligus membantu masyarakat dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi sebagai calon penerima bantuan.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Bangka Pau di nilai telah terlaksana dengan baik, Faktor pendukung dalam struktur birokrasi adalah telah dibuat Standart Operational Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Kemudian yang kedua adalah faktor struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas pelaksanaan menjadi tidak fleksibel. penerapan SOP di dalam program BSPS sangat penting untuk memastikan konsistensi dan efisiensi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Standart Operational Procedure (SOP). pembagian atau penyebaran tanggung jawab yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan membantu mengurangi beban kerja individual dengan mengalokasikan tugas sesuai dengan keahlian dan kapabilitas masingmasing anggota tim, sehingga dapat mencapai tujuan program BSPS secara efisien. Namun kekurangan dari pembagian tugas dalam Program BSPS yaitu masyarakat kurang memahami tentang orang-orang yang ada dalam pelaksanaan program BSPS termasuk juga tugas pokok dan fungsinya, yang mereka ketahui hanya dari pihak perangkat desa dan sebagian dari pihak dinas.

Hasil analisis menunjukan terkait struktur birokrasi dalam implementasi program, teridentifikasi beberapa faktor signifikan. Pertama, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dipandang sebagai elemen pendukung krusial. SOP berfungsi sebagai kerangka kerja normatif yang memandu tindakan implementor, sehingga meminimalisir potensi deviasi dari tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Penerapan SOP dalam konteks Program BSPS menjadi esensial dalam menjamin konsistensi dan efisiensi pelaksanaan. Kepatuhan terhadap tahapan yang tertuang dalam SOP memfasilitasi pembagian tanggung jawab yang terstruktur, yang berpotensi meningkatkan produktivitas tim dan mengurangi beban kerja individual melalui alokasi tugas yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing anggota, sehingga secara keseluruhan mendukung pencapaian tujuan Program BSPS secara efisien.

4. KESIMPULAN

Secara umum, implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Bangka Pau sudah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Ditinjau dari aspek komunikasi, penyaluran informasi masih belum menyeluruh ke masyarakat umum, dan

*Corresponding author
E-mail addresses: yenitadenaor16@gmail.com

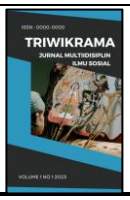

transparansi dana perlu ditingkatkan. Dari sisi sumber daya, keterbatasan tenaga dan dana yang belum memadai menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya pribadi, serta manajemen waktu dan material masih terkendala. Meski demikian, sikap pelaksana (disposisi) program menunjukkan optimalitas dan antusiasme dalam membantu masyarakat, serta struktur birokrasi dinilai berjalan baik dengan SOP yang ada, dan tidak memberatkan penerima bantuan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni. 2021. "Metode Penelitian." 32–41.

Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. pertama,ok. edited by Mustrose. semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Penerbit, "Widya Karya" Semarang Anggota IKAPI Nomor 117 / JTE / 2008.

Hawari, Rifat Aditya, Cut Zukhrina Oktaviani, and Nurisra Nurisra. 2021. "Komposisi Biaya Sumber Daya Material Dan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana." *Journal of The Civil Engineering Student* 3(2):148–54. doi: 10.24815/journalces.v3i2.14448.

I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubeis. 2022. *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. yogyakarta: DEEPUBLISHED (group penerbitan CV BUDI UTAMA).

Maswandhani Destriando, and Victor Lumbanraja. 2024. "Implementasi Program BSPS Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala Langkat." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3(1):9–14. doi: 10.55123/sosmaniora.v3i1.2999.

Mirza, Tony. 2018. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI DAERAH (SIPD) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 95 TAHUN 2018 (Studi Padabkpsdm Kota Palembang)." *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 3(1):10–27.

Robiansyah, Iyan, Nana Suryapermana, and Budi Sudrajat. 2022. "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang (Studi Di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang)." *Tsarwah* 7(1):12–19. doi: 10.32678/tsarwah.v7i1.6567.

Sitorus, Gerhad Frederic, Program, and Ilmu Komunikasi. 2020. "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020." 2–3.

Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. rev. ed. yogyakarta: Yogyakarta: Media Pressindo , 2007.